**PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Upaya Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial Pada Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Oleh :

MEI J SIHOMBING
NIM : H1B120051

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA JAMBI**

Nama : Mei J Sihombing
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B120051

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 28 Oktober 2024

Dosen Pembimbing 1

Alva Beriansyah, S.I.P., M.I.P.
NIP. 199010122019031012

Dosen Pembimbing 2

Sutri Destemi Elsi, S.I.P., M.I.P.
NIP. 198809082019032019

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA JAMBI

Nama : Mei J Sihombing
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Nim : H1B120051

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan Di hadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, Desember 2024

Dewan Penguji Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	DIMASRIZAL, S.SOS., M.SI.	Ketua Pembahas
2	ALVA BERIANSYAH, S.IP., M.I.P.	Pembimbing 1
3	SUTRI DESTEMI ELSI, S.IP., M.I.P.	Pembimbing 2

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada

- **Kedua Orangtua Tercinta**
- **Kakak, dan Abangku Tersayang**
- **Sahabat dan Teman-Teman ku**
- **Orang-Orang Yang Menyayangiku**
 - **Almamater Tercintaku**

LEMBAR MOTTO

“ Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau ; Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan.”

-Yesaya 41:10 TB-

“ Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela, Belajar untuk Bersyukur walaupun tak punya apa-apa, Belajar bangkit walaupun lemah, Belajar Tenang walaupun hati masih gelisah, Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar, Belajar Menata hidup Kembali walaupun luka masih belum pulih, karena kamu tidak sendirian.”

-Merry Riana-

“Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve, Apapun yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.”

-Mei J Sihombing-

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mei J Sihombing
Nim : H1B120051
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Politik dan Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Di Kota Jambi
Alamat : Desa Pargaulan, Kec. Lintong Nihuta, Kab. Humbang
Hasundutan
No. Hp : 082272580538

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar dari karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan hasil peniruan dan penjiplakan (plagiarisme) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya maupun pendapat yang ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dijelaskan dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dan kerjakan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan, ketidakbenaran dan kesalahan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2024
Yang Membuat Pernyataan

Mei J Sihombing
Nim : H1B120051

v

v

ABSTRACT

Political education is an important function carried out by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in Jambi City. Therefore, this research is motivated by the phenomenon where PDI-P does not actively provide political education to people outside the party, which contributes to low political awareness and participation among the community. This research uses descriptive qualitative methods and data collection methods through observation, interviews and documentation. This research uses political party theory and political education. The data collected was primary data and secondary data, while determining informants used purposive sampling. There are three data analysis techniques used, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research found that a lack of political education contributed to low public awareness and political participation, resulting in apathy in elections. In addition, obstacles faced by PDI-P include limited resources, lack of effective communication strategies, and difficulty reaching communities in remote areas. This research also shows that by improving political education strategies and increasing program accessibility, PDI-P can increase political awareness and community participation.

Keywords : *Political Education, PDI P, Community Participation*

ABSTRAK

Pendidikan politik merupakan fungsi penting yang dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di mana PDI-P tidak secara aktif melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luar partai, yang berkontribusi pada rendahnya kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori partai politik dan pendidikan politik. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa minimnya pendidikan politik berkontribusi pada rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, sehingga mengakibatkan apatisme dalam pemilu. Selain itu, kendala yang dihadapi PDI-P meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya strategi komunikasi yang efektif, dan kesulitan menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan memperbaiki strategi pendidikan politik dan meningkatkan aksesibilitas program, PDI-P dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, PDI P, Partisipasi Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Jambi”**.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan dan bimbingan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan bantuan semua pihak, skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut ambil bagian dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ungkapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Pertama Juruslamat tersayang, Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di setiap Langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terimakasih karena selalu memberikan harapan dan muzijat di waktu yang tepat ditengah keputusan penulis. Terimakasih kasih sudah menjadi rumah bagi penulis untuk meneteskan air mata sukacita.
2. Teristimewa Kepada Cinta Pertama Penulis, Ayahanda Manigor Sihombing dan pintu surgaku Ibunda tersayang Ristauli Simamora yang selalu memberikan semangat, pelukan, doa, dan kasih sayang kepada penulis. Sosok orangtua yang selalu berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi tanggungjawab dan semua kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan. Penulis sadar, bahwa setiap kata yang ada dalam skripsi ini adalah buah dari kerja keras kedua orang tua penulis.

Skripsi ini adalah persembahan untuk kedua orangtuaku tersayang dari putri kecil kalian yang saat ini sudah tumbuh dewasa dari awal perkuliahan dan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Usman, S.H., M.h Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan peran besar dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum.
4. Ibu Dr. Muskibah, S.H.,Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan system informasi telah mempermudah dalam urusan dalam urusan yang terkait dengan studi mahasiswa.
5. Bapak Dr. H. Umar, S.H.,M.H Wakil Dekan Bidang Umum Perencanaan dan keuangan yang telah berkontribusi dengan memberikan kemudahan mengakses fasilitas kepada mahasiswa Fakultas Hukum.
6. Bapak Dr.A.Zarkasi, S.H.,M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan solusi terhadap problematika perkuliahan yang dihadapi mahasiswa.
7. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP.,M.I.Pol.,Ph.D. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada mahasiswa agar menjadi sarjana yang memiliki kualitas dan integritas.
8. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.I.P. Koordinator Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan serta bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
9. Bapak Alva Beriansyah, S.I.P.,M.I.P. Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. Sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik

penulis yang selalu memberikan dukungan dalam perkuliahan dan administrasi studi penulis.

10. Ibu Sutri Destemi Elsi. S.IP.,M.IP Dosen sekaligus Pembimbing Skripsi Pendamping yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta dosen yang seperti orangtua yang tidak pernah lelah membimbing dalam proses pembentukan skripsi ini.
11. Bapak Dimasrizal, S.Sos., M.SI. Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis, nasihat, serta pengalaman yang luar biasa selama perkuliahan.
13. Seluruh Staf Tata Usaha serta seluruh pegawai di Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan layanan terbaik bagi penulis sehingga memudahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Seluruh informan yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga membantu penulis dalam proses penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk 8 Saudara penulis yang dipanggil dengan sebutan Abang dan Kakak serta Abang dan Kakak Ipar juga yang tidak dapat penulis tulis Namanya satu persatu. Terimakasih Penulis ucapkan karena telah memberikan dukungan, kepercayaan kepada penulis bahwa penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Terimakasih kalian tetap percaya kepada adik bungsu ini, untuk tetap berjalan walaupun sedikit lebih lambat dari yang lainnya.
16. Untuk seseorang yang tersayang, yang selalu menemani penulis dalam susah maupun senang, memberikan semangat, bantuan materi, serta kasih sayang kepada

penulis. Terimakasih penulis ucapkan untuk setiap usahanya dalam membantu proses penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

17. Untuk Sahabat Penulis Titin Simarmata, Eva Situmorang, dan Esra Silitonga, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, dan turut ambil bagian dalam membantu proses yang dilalui penulis.
18. Kepada seluruh Mahasiswa/I ilmu politik Angkatan 2020 yang telah mewarnai perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Jambi.
19. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Mei J Sihombing. Terimakasih karena tetap memilih untuk berjuang di tengah keraguan semua orang, menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu hebat, Mei.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan secara moril maupun material. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Jambi, November 2024

Penulis

Mei J Sihombing

NIM : H1B120051

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Landasan Teori.....	12
1. Partai Politik.....	12
2. Pendidikan Politik.....	12
1.6 Kerangka Berpikir.....	18
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Jenis Penelitian.....	20
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	20
1.7.3 Fokus Penelitian.....	20
1.7.4 Sumber Data.....	21
1.7.5 Teknik Penentuan Informan.....	21
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	24
1.7.8 Keabsahan Data.....	25
BAB 2 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	26
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Jambi	26

2.2 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	32
2.3. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jambi	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
3.1 Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.....	45
3.2 Kendala Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Masyarakat	57
3.3 Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi	65
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Informan Penelitian.....	25
Tabel 2.2	Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	40
Tabel 2.3	Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi Masa Bakti 2019-2024.....	45
Tabel 2.4	Struktur Komposisi Personalia DPC PDI Perjuangan masa bhakti 2019-2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir.....	21
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Jambi.....	29
Gambar 2.2	Lambang Kota Jambi.....	30
Gambar 2.3	Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	41

DAFTAR SINGKATAN

PDI -P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
Pemilu	: Pemilihan Umum
Parpol	: Partai Politik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Golput	: Golongan Putih
DPT	: Daftar Pemilih Tetap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan suatu konsep yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara. Pendidikan politik adalah komponen yang sangat penting dalam upaya memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Pendidikan politik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban politik mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Masyarakat yang teredukasi dengan baik dalam bidang politik akan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan demokrasi, baik dalam memilih wakil rakyat maupun dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Makna pendidikan politik lebih luas dari itu. Selain itu Pendidikan politik juga dapat di katakan sebagai suatu cara mempertahankan keadaan yang relatif stabil di keadaan tertentu sehingga dapat di gunakan sebagai dasar bagi proses demokrasi.¹

Pemahaman politik atau pemahaman aspek – aspek politis dari setiap permasalahan Memiliki persamaan dimana Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Disisi lain Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu warga negara untuk dapat memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai, sehingga memiliki kemampuan berfikir yang kritis guna melawan situasi dan kondisi yang tidak wajar.

¹ Dr Eko Handoyo dan Puji Lestari, “*Pendidikan Politik*”. Yogyakarta : Pohon Cahaya. 2017. Hlm 11 - 12

Adapun beberapa Fungsi dari adanya Pendidikan politik adalah :

1. Mengubah dan Membentuk Perilaku: Guna untuk mengubah dan membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tujuan politik yang mampu menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab.
2. Pemahaman dan Penghayatan Nilai Politik: Pendidikan politik bertujuan untuk pemahaman masyarakat tentang politik, nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.
3. Partisipasi Politik yang Bertanggung Jawab: fungsi pendidikan politik juga melibatkan pembentukan partisipasi politik yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik negara.
4. Proses Dialog: Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog baik di lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik.²

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Menurut Soeharto, tujuan pendidikan politik adalah membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik pada diri warga negara.

² Yudin Citriadin *Pengantar Pendidikan* Tahun 2019, hlm.1.

Adapun tujuan pendidikan politik menurut Kartono adalah :

Membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang baik, aktifitasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati, dan sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Kemudian, memperhatikan peran masing-masing dari setiap individu sebagai warganegara, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya seperti pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan. Agar dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara.³

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politik dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik.. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, sikap, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut.

Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 31 mengatakan bahwa partai politik melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran

³ *Ibid, hlm.16.*

hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas hasil pemilu. Dalam konteks pranata masyarakat mempresentasikan kepentingannya, memilih dan dipilih adalah hak asasi bagi manusia, untuk itu partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang idealnya memberikan Pendidikan politik dan pencerahan kepada rakyat sebagai konstituennya.⁴ Partai politik adalah salah satu pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Partai politik akan mampu menjalankan perannya dengan efektif apabila ada tanggung jawab bersama antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat luas.

Partai politik di Indonesia memiliki 5 fungsi yaitu :

1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
3. Sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara
4. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia

⁴ Marselina Kareth, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)* Tahun 2016.skripsi.

5. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁵

Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara atau masyarakat. Partai politik berperan dalam melakukan pendidikan politik sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk dari penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi politik, kampanye, ataupun melalui kaderisasi partai. Dalam hal ini tentunya harus ada sinergis antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat sebagai objek dan subjek penyelenggara.

Partai PDI-P merupakan salah satu partai yang telah lama eksis dalam percaturan politik nasional. Partai ini juga telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam rangka memantapkan keberadaan peran dan fungsi PDI-P ditengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pendidikan politik tentunya menjadi agenda yang wajib dilakukan oleh partai tentunya tidak lepas dari kewajiban partai PDI-P.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan pesertanya adalah pengurus partai tingkat DPC, PAC, Sayap sayap partai, badan badan partai, kader kader partai yang telah mengikuti Pendidikan kader tingkat pratama dan sampailah pada kader tingkat kecamatan dan kelurahan yang terdaftar dalam kepengurusan badan dan sayap partai. tidak dengan masyarakat awam atau masyarakat biasa. Mengingat masyarakat sangat perlu mendapatkan Pendidikan politik dimana Pendidikan politik di kota jambi masih sangat minim, dari sosialisasi

⁵ *Ibid*, hlm.98.

pemilih pemula yang belum dilakukan, kemudian pemilih tua yang masih banyak merasa kebingungan melihat surat suara yang banyak ketika pemilu, kemudian para caleg kurang di edukasi mengenai bahayanya *black campaign* (kampanye hitam) bahkan masyarakat banyak yang tidak tau apa itu *black campaign*. Oleh karena itu, Partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, memegang peranan penting dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai besar di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengedukasi kader dan masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Di Kota Jambi, PDI Perjuangan sebagai salah satu kekuatan politik lokal, juga diharapkan berperan dalam memberikan pendidikan politik yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kualitas demokrasi.

Di Kota Jambi pendidikan politik sangat minim sehingga peran partai dalam memberikan pengetahuan politik sangatlah penting. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia merupakan partai tertua sekaligus partai pemegang kekuasaan selama 2 periode, partai yang dapat dinilai sebagai partai yang memiliki nilai politik yang tinggi, dan tingkat pendidikan pengurus partai yang bagus. Mengingat, Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Sehingga Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah

memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal ini dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada, sehingga memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menjadi golput (golongan putih). Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (political education) bagi rakyat. Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga Negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai.⁶ Karena jika masyarakat biasa atau masyarakat awam tidak mengetahui fungsi dari Pendidikan politik, maka akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah, sikap apatis dalam memberikan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan karena dapat membentuk situasi kebijakan yang berjalan satu arah.

Akibat dari tidak adanya Pendidikan politik di masyarakat ternyata menimbulkan berbagai fenomena di masyarakat yaitu menjadi minimnya pengetahuan. selain itu penghayatan dan pemahaman politik seperti yang dijelaskan pada fungsi Pendidikan politik menjadi suatu hal yang tidak diketahui masyarakat. Oleh karena pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pendidikan politik mengakibatkan partisipasi masyarakat mengenai politik bebas dan aman sangat minim karena hanya mempertimbangkan keuntungan secara pribadi tanpa mempertimbangkan tatanan demokrasi demi menciptakan politik aman.

⁶ *Ibid.*

Fenomena selanjutnya yang terjadi di masyarakat menurut informasi dari salah seorang anggota partai yaitu adanya kekeliruan dari isu yang di ciptakan media sosial dengan mengadakan pengalihan isu tentang suatu peristiwa perpolitikan sehingga mempengaruhi masyarakat dari segi politik baik politik ekonomi, politik keamanan dan politik pertahanan negara. Masyarakat kurang mencerna secara baik. Sementara keresahan dan ketentraman menjadi suatu kelemahan di masyarakat. Dengan kata lain masyarakat tidak bisa mencerna dan mengkaji ulang mengenai permasalahan yang sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat membedakan fiktif karangan atau fakta. Dan ini tentunya menjadi permasalahan di tengah masyarakat.

pelaksanaan pendidikan politik oleh PDI Perjuangan di Kota Jambi belum banyak dikaji secara mendalam. Meskipun PDI Perjuangan dikenal aktif dalam dunia politik, implementasi pendidikan politik di tingkat lokal masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana program-program pendidikan politik yang dijalankan dapat mencapai tujuannya. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana PDI Perjuangan melaksanakan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi? Apa saja bentuk program pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh partai ini, dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat setempat? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul? Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi, sekaligus

memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan program pendidikan politik yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhel Muhammad yang berjudul “Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi Chandler, Formasi sasaran dan jangka Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan berbagai strategi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Strategi tersebut melibatkan pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan sosialisasi di sekolah-sekolah, kampanye pendidikan pemilih, dan program-program pelatihan keterampilan berpartisipasi dalam proses demokratis.⁷ Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus yang sama yaitu pendidikan politik. Namun tetap memiliki perbedaan dalam penelitiannya karena pada penelitian terdahulu menggunakan teori strategi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori partai politik dan pendidikan politik.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprillio Poppy Belladonna yang berjudul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Masyarakat”. Menjelaskan bahwa Pendidikan politik masyarakat sekarang ini masih sangat minim, dapat dilihat dari sikap partisipasi masyarakat yang masih sangat pasif. Metode dalam penelitian ini menggunakan

⁷ Fadhel Muhammad, *Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*

pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, belum maksimal dirasakan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami benar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam dunia politik, melalui program yang dilaksanakan oleh partai dalam memberikan pendidikan politik banyak menghadapi kendala dimulai dari objeknya sendiri yaitu masyarakat.⁸ Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan di fokus penelitiannya, yaitu sama sama membahas bagaimana fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh partai politik untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Meskipun PDIP sebagai partai politik memiliki peran strategis dalam melaksanakan pendidikan politik, masih terbatas informasi mengenai bagaimana pendidikan politik dilaksanakan di Kota Jambi mengindikasikan bahwa penelitian ini sangat relevan. Berdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.”** Yang di harapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai pentingnya pendidikan politik melihat banyaknya fenomena permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini di

⁸ Aprillio Poppy Belladonna, *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Masyarakat Tahun 2019.*

harapkan dapat memberikan solusi melalui analisis dari hasil penelitian yang dijabarkan dengan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan kembali masalah yang akan dikaji, sehingga penyelesaian masalah bisa ditentukan dengan tepat dan mendapat tujuan dari penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi
2. Apa yang menjadi kendala DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai target yang di inginkan sehingga, dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana DPC PDI-P Kota Jambi dalam menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan politik untuk seluruh masyarakat Kota Jambi serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja kendala PDI-P dalam pelaksanaan fungsi pendidikan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya diharapkan dapat memberi umpan balik atau manfaat kepada berbagai pihak. Penelitian ini bermfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai pembandingan bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan fungsi Pendidikan politik oleh partai.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini yang pertama diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai dalam melakukan Pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan, bahkan masyarakat umum. Kedua, bagi masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

1.5 Landasan Teori

1. Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara. Pendidikan merupakan suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik yang salah satunya

melalui peran partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan, sosialisasi politik, diskusi, seminar, serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.

Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya.⁹ Kemudian M. Nur Khoiron juga menyatakan bahwa Pendidikan politik bagi warga negara adalah penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan ditengah medan politik dan konflik konflik. pendidikan politik ini dilakukan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran bernegara.¹⁰ tujuan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari para kader dan pengurus partai politik, serta masyarakat.

Menurut M Nur Khoiron, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan tentang politik, tetapi juga berfungsi untuk membentuk sikap

⁹ Ashika Rahman, —Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraanl, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, 2018, [Jurnal Online], www.researchgate.net.

¹⁰ M.Nur Khoiron, dkk, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*, (Yogyakarta: LKiS, 1990), hlm.4.

dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan bahwa pendidikan politik seharusnya dapat mengubah pola pikir individu agar lebih peka terhadap isu-isu politik, dan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Salah satu tujuan utama dari pendidikan politik menurut Khoiron adalah menumbuhkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, baik itu kader partai politik, anggota organisasi, maupun masyarakat umum. Kesadaran politik ini mencakup pemahaman terhadap hak-hak politik yang dimiliki individu, serta peran mereka dalam sistem politik yang ada. Pendidikan politik juga bertujuan untuk mendorong partisipasi politik aktif dari masyarakat. Partisipasi ini bisa dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pemilu, kegiatan partai, maupun aksi politik lainnya. Khoiron menganggap bahwa partisipasi aktif dalam politik adalah salah satu cara untuk menguatkan demokrasi, karena dengan adanya partisipasi politik, akan tercipta kontrol sosial yang lebih efektif terhadap kekuasaan.

Beberapa bentuk pendidikan politik yang efektif dalam membentuk kesadaran politik dan partisipasi politik, baik dalam konteks internal partai politik maupun masyarakat: pertama, pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan politik di kalangan kader. Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan tentang cara-cara berpolitik yang baik, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan organisasi kader. Kedua, sosialisasi ideologi partai. Dalam konteks partai politik, pendidikan politik juga mencakup sosialisasi ideologi partai kepada kader dan anggota partai. Ini bertujuan agar semua anggota partai memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh partai tersebut. Ketiga, diskusi

politik Pendidikan politik dalam bentuk diskusi politik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analitis kader dan anggota partai dalam menanggapi berbagai isu politik yang berkembang. Forum ini dapat menjadi tempat bagi anggota untuk berbagi ide dan memperkaya wawasan politik mereka. Keempat, seminar dan lokakarya. Seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh partai dapat memperkenalkan kader kepada isu-isu politik terkini, serta memberikan pelatihan praktis mengenai strategi kampanye, teknik berbicara di depan umum, serta penyuluhan tentang cara-cara yang efektif dalam berpolitik.

Kelima, kampanye politik. Kampanye politik menjadi salah satu bentuk pendidikan politik praktis yang memberikan kesempatan bagi kader untuk berlatih terjun langsung dalam dunia politik. Melalui kampanye, kader dapat mempraktikkan keterampilan berorganisasi, berbicara dengan masyarakat, serta menerapkan nilai-nilai ideologi partai dalam aksi nyata. pendidikan politik merupakan proses yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang politik, tetapi juga untuk membentuk kesadaran dan keterampilan politik, serta mendorong partisipasi politik yang aktif di kalangan masyarakat dan kader partai. Bentuk-bentuk pendidikan politik seperti pelatihan kepemimpinan, sosialisasi ideologi, dan kampanye politik memiliki peranan penting dalam membentuk kader yang siap berpartisipasi dalam politik praktis, baik dalam konteks internal partai maupun di tingkat masyarakat.¹¹

¹¹ M Nur Khoiron, pendidikan politik dalam demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik, dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Partai politik memiliki peran yang penting dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat juga kader partai tentang pentingnya politik. Karena, partai merupakan sebuah organisasi yang bisa berinteraksi ke masyarakat dan kadernya secara langsung. Menurut Kuntowijoyo bentuk Pendidikan politik, adalah

1. Pendidikan politik formal dan
2. Pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal.¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangkan perjuangan politik partai. Dan Pendidikan menjadi sesuatu yang penting di implementasikan pada

¹² Kuntowijoyo, *Metode Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm.58.

masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap politik oleh karena itu, teori ini sangat penting digunakan karena dalam indikator penilaian akan mengarahkan penelitian terhadap pentingnya Pendidikan politik.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penulis dalam merancang dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian ini, diperlukan suatu panduan berupa kerangka pikir yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan yang sedang diteliti, seperti kerangka pikir yang telah ditampilkan di atas.

Pada penelitian ini dirujuk dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menjelaskan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Berdasarkan rujukan tersebut, maka penelitian ini mengarah pada Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi guna menghasilkan masyarakat yang sadar politik, aktif dalam proses demokrasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

1.7 Metode Penelitian

Pada hakikatnya, metode penelitian adalah tahapan-tahapan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh informasi untuk mencapai target penelitian atau kebermanfaatan yang telah ditetapkan. Tahapan ilmiah ini bermakna aktivitas penelitian dilaksanakan menurut kriteria-kriteria keilmuan, yakni: empiris, rasional, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan-tahapan yang logis, sehingga dapat disetujui pembaca.

Sementara itu, empiris bermakna langkah-langkah penelitian tersebut dapat diperhatikan melalui panca indera manusia, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengulang kembali langkah tersebut di penelitiannya atau memodifikasinya agar memperoleh penemuan baru. Adapun yang dimaksud dengan sistematis ialah

kegiatan penelitian dilaksanakan melalui tahapan tahapan yang tertata dengan baik dan benar yang bersifat logis¹³.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai fenomena atau masalah yang ada dilapangan. Dengan metode kualitatif, data yang tidak dapat diolah atau dianalisis dengan prosedur statistik dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan metode ini.¹⁴ Sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam terkait Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi. Karena penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Pendidikan politik di Kota Jambi yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan, maka objek dalam penelitian ini adalah DPC PDI Perjuangan. Besarnya lingkup dalam penelitian sosial, dan keterbatasan yang dimiliki peneliti untuk meneliti objek penelitian maka Fokus penelitian ini hanya membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dengan melihat bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta menganalisis

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm 2.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm. 2-3

faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh dengan mewawancarai secara langsung dari sumber asli atau informan untuk mendapatkan data atau informasi secara faktual. Sumber data primer di dalam penelitian ini merupakan informan yang menguasai dan memahami mengenai Pendidikan politik.¹⁵

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersumber dari catatan, buku atau majalah yang datanya sudah diolah. Dapat dipahami, bahwa data ini diperoleh dari tangan kedua, sehingga peneliti langsung dapat memperoleh informasi dari data yang disajikan dan tidak perlu diolah kembali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi pustaka berupa naskah naskah, buku artikel jurnal, internet dan dapat diperlukan spesifik untuk kebutuhan peneliti.¹⁶

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel dalam hal ini informan adalah *Purposive Sampling*, dengan teknik ini pengambilan sampel sumber dilakukan dengan pertimbangan tertentu.¹⁷ Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya sehingga data

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 418.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 419.

yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang peneliti angkat untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan.

Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Ir. Muhammad Amir Fauzi	Ketua DPC PDI Perjuangan	Ketua pelaksana pendidikan politik
2	Maria Magdalena S.S	Anggota DPRD Kota Jambi sekaligus Anggota PDI-P	Wakil bidang kaderisasi dan ideologi
3	Sofian Tampubolon	Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Peserta Pendidikan Politik
4	Rusli Anum	Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Peserta Pendidikan Politik
5	Reza	Humas dan Media DPC PDI P Kota Jambi	Pembangun komunikasi dan citra yang baik antara partai dan publik/masyarakat
6	Dandi Sanjaya	Humas dan Media DPC PDI P Kota Jambi	Pembangun komunikasi dan citra yang baik antara partai dan masyarakat
7	Beni Supratno	Humas dan Media DPC PDI P Kota Jambi	Anggota partai yang ikut turun ke masyarakat untuk Pembangun Komunikasi dan citra yang baik antara partai dan masyarakat
8	Muhammad Kardi	Ketua RT 05	Merupakan ketua rukun tetangga sekaligus masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan

			yang diadakan oleh PDI-P
9	Arif	Salah satu masyarakat yang bekerja di kantor pemerintahan	Masyarakat yang dianggap mampu memberikan pandangan tentang sistem politik
10	Parulian Saragih	Organisasi Pemuda Batak Bersatu	Masyarakat sekaligus organisasi yang ikut mengamati bagaimana pendidikan politik di Kota Jambi
11	Tuti	Tokoh Masyarakat pemilih PDI P	Masyarakat yang dalam pemilu sebelumnya memilih PDI P, untuk memahami bagaimana pendidikan politik mempengaruhi keputusan mereka.

Sumber : Olahan Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yaitu:¹⁸

a. Wawancara

Memperoleh data dengan cara peneliti menanyakan beberapa butir pertanyaan yang telah di susun kepada responden secara langsung yang bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang di sesuai dengan penelitian.¹⁹

¹⁸ Ibid hlm.1

¹⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosda 2011), hlm 67

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pemerolehan data atau informasi berupa buku, arsip/dokumen, artikel ilmiah, naskah, gambar, dan lain sebagainya sebagai laporan yang di sertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian dan menunjang penelitian yang sedang di lakukan dan tentunya dapat membantu mendukung argumen-argumen peneliti.²⁰

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data perlunya dilakukan pemilihan data yang relevan agar dapat menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, karna data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data, maka data di sajikan dalam bentuk narsi deskriptif. Kemudian setelah data secara rinci di sajikan selanjutnya data tersebut di bahas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara singkat di bahas.

²⁰ Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 199

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data atau Triangulasi adalah prosedur untuk memverifikasi validitas data untuk dibandingkan dengan data lain, seperti metode, peneliti, referensi, dan konsep. Terdapat teknik triangulasi data dalam penelitian kualitatif dibagi berdasarkan data yang diperiksa.

1. Triangulasi sumber (Data Triangulation), yang berarti menggunakan berbagai sumber data dalam penelitian.
2. Triangulasi peneliti (Investigator Triangulation), yang berarti menggunakan beberapa peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi metodologis (Methodological Triangulation), yang berarti menggunakan sejumlah perspektif metodologis dalam suatu penelitian.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Jambi

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Jambi

Kota Jambi merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dari Provinsi Jambi. Kota Jambi di belah oleh sungai yang di beri nama sungai Batanghari, kedua lokasi di hubungkan dengan jembatan aurduri. Secara geografis Kota Jambi terletak pada $01^{\circ}30'2.98''$ - $01^{\circ}7'1.07''$ Lingkar selatan dan $103^{\circ}40'1.67''$ - $103^{\circ}40'0.23''$ Bujur Timur. Kota Jambi memiliki luas wilayah sebesar $205,38 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan serta di kelilingi oleh satu Kabupaten yaitu Muaro Jambi²¹.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Jambi

²¹ Website Pemerintahan Kota Jambi, “Sejarah Kota Jambi” <https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/> diakses Tgl 3 Juli 2024

Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan di bentuk sebagai pemerintahan daerah otonom Kotamadya berdasarkan ketetapan gubernur sumatera Nomor 103/1946. Kemudian di tingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi sumatera tengah.

Kedudukan Jambi secara administratif berubah dalam beberapa tingkatan mulai dari daerah otonom, kotamadya dan kota besar. Sehingga Jambi resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Jambi pada 6 Januari 1957 berdasarkan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958²².

2.1.2 Lambang Kota Jambi

Lambang Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagian yang meruncing di bawah di kelilingi tiga garis dengan warna bagian luar putih, tengah warna hijau, dan luar berwarna putih. Seperti gambar di bawah :

Gambar 2.2 Lambang Kota Jambi

²² Website Kompas.com “*Sejarah Kota Jambi : Asal-usul Nama, Cerita Angso Duo dan Lokasi*” <https://regional.kompas.com/read/2022/02/11/sejarah-kota-jambi-asal-usul-nama-cerita-angso-duo-dan-lokasi> diakses Tgl 3 Juli 2024

Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan di dalamnya tercantum tulisan "Kota Jambi" yang melambangkan nama daerah dan di apit oleh bintang bersudut lima warna putih itu melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang Mahaesa. Semboyan Kota Jambi adalah Tanah Pilih Pusako Betuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa kemasyarakatan sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas²³.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Jambi

1. Visi

"Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima"

2. Misi

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
2. Penguatan penegakan hukum, trantibnas dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastuktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat perkotaan.²⁴

²³ Irawati Sukandar, *Selayang Pandang Kota Jambi*, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2014, hlm 22

²⁴ *Ibid* hlm 24

2.1.4 Topografi

Wilayah Kota Jambi berada pada ketinggian dengan kisaran 10 – 60 mdpl. Kota Jambi sebagian besar datar (0-2%) dengan luas 11.326 Ha, bergelombang (2-15%) dengan luas 8.081 Ha dan sedikit curam (15-40%) dengan luas 41 Ha. Dari topografinya, Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0 – 60 meter di atas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan kurang 1.700 km (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi dengan lebar sungai $\pm$ 500 m), sungai ini berhulu pada danau di atas Provinsi Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Sumatera pada kawasan Selat Berhala²⁵.

2.1.5 Demografi

Kota Jambi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Jambi, yakni sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk Provinsi Jambi. Dari 621.365 jiwa pada Tahun 2021, penduduk Kota Jambi juga termasuk yang paling majemuk di Provinsi Jambi. Suku asli Kota Jambi terdiri dari suku Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah, Suku Anak Dalam dan Kerinci. Suku Jambi (Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah) merupakan suku bangsa paling dominan di Kota Jambi. Setidaknya ada 6 suku bangsa yang memiliki jumlah signifikan di Kota Jambi yakni Suku Jambi, Jawa, Minangkabau, Batak, Tionghoa, dan Melayu di luar orang jambi.

²⁵ *Ibid hlm 26*

Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia, penduduk Kota Jambi yang berasal dari Suku Jambi sudah termasuk semua sub-suku Melayu Jambi (Batin, Penghulu, Pindah) sebanyak 186.811 jiwa atau 35,35%, diikuti oleh Jawa sebanyak 110.527 jiwa atau 20,92%, kemudian diikuti oleh Minangkabau di Kota Jambi sebanyak 58.484 jiwa atau 11,07%, kemudian Melayu lainnya di luar orang Jambi sebanyak 24.684 jiwa atau 4,67%. Suku lainnya seperti Batak dan Tionghoa, juga memiliki jumlah yang signifikan di Kota Jambi.

Suku asal Sumatera lainnya di Kota Jambi didominasi oleh Suku Batak, asal Sumatera Selatan, dan Kerinci. Selibuhnya adalah Suku Aceh, Nias dan Suku lainnya asal Sumatera. Sementara suku asal Jawa lainnya kebanyakan adalah orang Sunda. Dan suku lainnya didominasi oleh warga keturunan Tionghoa, kemudian suku asal Kalimantan sebagian besar adalah Suku Banjar, dan dari Sulawesi sebagian adalah Suku Bugis.

2.1.6 Sosial Budaya

Kehidupan sosial masyarakat Kota Jambi jika dilihat dari segi sosial budayanya berpedoman kepada pepatah "*adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah*". Masyarakat Kota Jambi adalah masyarakat yang berbeda, banyak suku bangsa yang berbeda namun tetap berpedoman kepada pepatah adat "*dimana bumi dipijak di situ laingit di junjung*" yang membuat semua menjadi suatu kesatuan.

Dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Kota Jambi terkenal dengan kerja bakti atau disebut dalam pepatah "*berat samo dipikul ringan samo di jinjing*" segala pekerjaan yang dikerjakan bersama atau hal – hal yang menyangkut kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dimufakatkan

sebagaimana di utarakan dalam pepatah *"bulat air di pembuluh bulat kato di mufakat, kalau bulat bolehlah di golekkan kalau pipihlah boleh di layangkan"*. Dalam kehidupan masyarakat di warnai oleh sikap, perilaku, dan pandangan dalam keagamaan. Agama sangat berpengaruh kepada masyarakat tentang kehidupan sosial. Secara umum kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Jambi berjalan dengan baik dikarenakan sudut pandang segi – budaya yang ada di Kota Jambi walaupun etnis dan agama yang berbeda keharmonisan tetap harus terjaga dengan baik²⁶.

2.1.7 Kecamatan

Kota Jambi memiliki 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan (dari total 141 Kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Kota Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 609.620 jiwa dengan luas wilayahnya 103,54 km² dan sebaran penduduk 5.887 jiwa/km². Tiga kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Alam Barajo yang merupakan hasil dari Kota Baru, Kecamatan Paal Merah dari Jambi Selatan dan Danau Sipin dari Kecamatan Telanaipura²⁷.

²⁶ *Ibid hlm 55*

²⁷ Website Ensiklopedia Dunia *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi* [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Jambi) di akses 4 Juli 2024

2.2 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2.2.1 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Indonesia

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan²⁸ merupakan partai politik yang memiliki ikatan kesejarahan dengan partai-partai politik terdahulu. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil dari gagasan fusi partai politik. selain itu sejarah PDI dan PDI Perjuangan juga dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Akar ideologis PDI Perjuangan memiliki pertalian dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Ir Soekarno. Menurut Asvi Warman Adam seorang peneliti utama LIPI dan ahli sejarah Indonesia menjelaskan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari Bung Karno karena salah satu elemen utamanya adalah PNI yang didirikan oleh Soekarno.²⁹

Sejarah PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima partai politik berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan. Seiring perjalanannya PDI terus bongkar pasang dalam struktur pimpinan. Sampai pada suatu kepemimpinan Soerjadi yang saat itu dikecam oleh pemerintah di masa orde baru. Kehendak penguasa untuk mengakhiri karier Soerjadi sudah bulat. Sejumlah “dosa politiknya” terhadap Orba mengharuskan ia

²⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024, hlm.51

²⁹ Imran Hasibuan, dkk. Gerak Sejarah Partai Banteng PNI, PDI dan PDI Perjuangan (DPP PDI Perjuangan Bekerjasama dengan Q Communication, 2015), hlm. XVII.

dikubur, sama dengan para senior sebelumnya. Kongres Medan dipersiapkan untuk itu. Tapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan. Akibatnya, “aklamasi” bagi kembali berkuasanya Soerjadi dilakukan tubuh ini. Tapi ini melahirkan penentangan luas, apalagi kehendak penguasa memang bergerak ke arah itu. Kontroversi yang terus berlangsung akhirnya ditemukan jalan keluarnya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.³⁰

PDI Perjuangan dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum 45 bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nama PDI Perjuangan semakin menggema di negeri ini, terutama ketika menjelang pemilu tahun 1999. Karena di tahun tersebut, PDI berubah nama menjadi PDI Perjuangan dan partai ini pun siap menghadapi pemilu pertamanya. Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Dalam perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden RI ke-4.

³⁰ Ahmad Wiratman, Skripsi : “Aktivitas Public Relations Politik Pdi Perjuangan Melalui Konsolidasi Menjelang Pemilihan Gubernur Bali 2018” (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), Hlm.44

Dalam kongres III PDI Perjuangan tahun 2010, Ketua Umum PDI Perjuangan kembali menegaskan pentingnya Ideologi dalam membangun partai. Hal tersebut juga sebagai otokritik berkaitan dengan kekalahan PDI Perjuangan dalam pemilihan umum 2004 dan 2009 menyadarkan pimpinan partai untuk menata kembali gerak partai secara mendasar dengan konsolidasi ideologis dengan menjadikan ideologi sebagai acuan gerak dan kebijakan partai. Ideologi sebagaimana yang seringkali dipahami adalah sebagai dasar, pijakan dan penuntun bagi seseorang, kelompok atau organisasi dalam menjalankan kehidupannya (organisasi). Gramsci menyebutkan bahwa ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya. Dengan demikian maka ideologi bagi sebuah organisasi sangatlah penting dalam rangka menentukan sikap, kebijakan, dan haluan organisasi kedepan.³¹

PDI Perjuangan meyakini bahwa ideologi merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai partai dan mendasari seseorang atau organisasi dalam bertindak dan berperilaku seperti yang dikatakan Soekarno bahwa ideologi adalah satunya kata dan perbuatan.⁶ Salah satu program ideologi PDI Perjuangan adalah pendidikan kader di berbagai tingkatan secara berjenjang. Tujuannya agar setiap kader PDI Perjuangan memahami dan mampu membumikan ideologi partai dalam bentuk kerja nyata. Para kader diharapkan agar dapat berperan di masyarakat, terutama membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari.

³¹ Imran Hasibuan, dkk. Gerak Sejarah Partai Banteng PNI, PDI dan PDI Perjuangan (DPP PDI Perjuangan Bekerjasama dengan Q Communication, 2015), hlm.180.

Para kader inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak terhadap kebangkitan dan kemajuan PDI Perjuangan di seluruh daerah di Indonesia³².

Kendali PDI Perjuangan tidak pernah terlepas dari peran Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Pada Kongres IV PDI Perjuangan, sosok Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020. Kongres ke-V diselenggarakan di Bali pada 08-11 Agustus 2019. PDI Perjuangan mempercepat kongres yang seharusnya dilaksanakan tahun 2020 bertujuan untuk mensinergikan semua program kepartaian dengan program pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pada Kongres V PDI Perjuangan sosok Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Tabel 2.1

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No	Ketua Umum		Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Periode
1		Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri	24 Maret 1999	31 Maret 2005	1
			31 Maret 2005	6 April 2010	2
			6 April 2010	9 April 2015	3
			9 April 2015	8 Agustus 2019	4
			8 Agustus 2019	Pertahanan (2024)	5

³² Ibid, hlm 196.

2.2.2. Visi dan Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai³³. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berKetuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualism dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

i. Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDI PERJUANGAN

³³ Pdiperjuangan.id, Visi dan Misi <https://pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-danmisi> diakses pada: 4 Juli 2024

Di Indonesia, PDI Perjuangan jadi salah satu partai yang ikonik. Partai berlambang banteng itu gampang diingat. Simbol banteng sendiri bukan hanya dipakai PDI Perjuangan. Sebelumnya, kepala banteng dipakai menjadi simbol organisasi sejak Sarekat Islam yang didirikan HOS Tjokroaminoto. Kemudian, Bung Karno dengan PNI nya juga menggunakan simbol Banteng.³⁴ Filosofi dari Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih dijelaskan sebagai berikut:³⁵

- a. Warna Merah Membara Berani mengambil resiko dalam memperjuangkan rakyat, keadilan dan kebenaran.
- b. Tanduk Kekar diartikan Berbasis kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.
- c. Mata Merah Tajam diartikan Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
- d. Moncong Putih diartikan Dapat dipercaya dan jujur untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- e. Lingkaran Tegas diartikan Terus menerus tanpa terputus memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

³⁴ Era.id, Mata Banteng di Logo PDIP <https://era.id/sejarah/75967/mata-banteng-di-logopdi-kok-merah-bukan-putih-apa-maksudnya> diakses pada: 4 juli 2024

³⁵ Pdiperjuangan.id, Tata Kelola Partai <https://pdiperjuangan.id/detail-article/841/tatakelola-partai> diakses pada: 4 juli 2024

**b. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jambi**

2.3.1. Gambaran Umum PDI-P di Provinsi Jambi

Sejarah PDI Perjuangan di Provinsi Jambi juga bersamaan dengan pembentukan kelembagaan partai di tingkat pusat. pembentukan partai politik bahwa, harus memiliki kepengurusan partai politik di tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara, kepengurusan tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. maka terbentuklah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi Jambi. Struktur pimpinan atau pengurus partai secara berjenjang terdiri atas :

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Disingkat DPP Partai di Tingkat Nasional.
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai Disingkat DPD Partai di Tingkat Provinsi.
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai Disingkat DPC Partai di Tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri.
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya.
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara.
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya.

- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/reroga RW atau sebutan lainnya.

Struktur pimpinan atau pengurus PDI Perjuangan telah tersusun secara sistematis, mulai dari tingkatan paling tinggi pada tingkat nasional sampai dengan tingkatan terendah yaitu tingkat pengurus anak ranting yang berada di dusun atau RW, Adanya tingkatan ini dapat memperjelas jalur koordinasi dan komunikasi antar sesama kader partai serta efektif dan efisien menjadi penyalur aspirasi pada tingkatannya masing-masing.

PDI Perjuangan Provinsi Jambi tahun 1999-2000 dipimpin oleh H. Nasrun Arbain, Pada tahun 2000-2005 PDI Perjuangan berada dibawah kepemimpinan H. Soewarno Soerinta. Memasuki tahun 2005 PDI Perjuangan dipimpin oleh H. Turimin. Pada tahun 2007 H. Turimin meninggal dunia sehingga digantikan oleh Irsal Yunus dan bertahan dua periode sampai dengan tahun 2015. Seterusnya tonggak kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan pada tahun 2015 dipimpin oleh Edi Purwanto hingga 2019 dan terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah pada Konferensi Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jambi 2019-2024.

2.3.2. Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi.

Tabel 2.3.2

Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi Masa Bakti 2019-2024³⁶

NO	NAMA	JABATAN
1	Edi Purwanto, S.H.I., M.Si.	Ketua
2	Nazrin Lazie, S.H.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai
3	Hotman P. Sitanggang, S.H.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
4	M.Asriadi, S.T.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
5	Edison, S.H.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
6	Hj. Ratu Munawaroh	Wakil Ketua Bidang Politik
7	AKBP (P). Henni Astuti, S.H.	Wakil Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang Undangan
8	Petrus Hilman Dapot Tuah Purba, BBA.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian
9	Drs. Ahmadi Zubir, M.M.	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan
10	Syahrial Gunawan	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
11	A.M.Guntur Muchtar	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, dan Jaminan Sosial
12	Dr.Hj. Muallimah Rahdiana, M.Pd.	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak
13	Junedi Singarimbun, S.E.	Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

³⁶Adenin Aulia Nasution, Kemenangan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Pada Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019

14	Hj. Linda Astuty, S.E., M.M.	Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM
15	M. Amin, S.K.M., M.Kes.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
16	S. Eko Edy Utono, S.E.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
17	Umi Syamsiatun, S.Pd.	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
18	Frans Sugama Tambunan, S.H.	Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan
19	H. Zaidan, S.H.I.	Sekretaris
20	Dody Harmoko, S.T.P.	Wakil Sekretaris Bidang Internal
21	Kemuning Gilang Pertiwi, M.Des.	Wakil Sekretaris Bidang Program
22	Nur Tri Kadarini, S.E., M.Si.Ak	Bendahara
23	Vicky Fandy Yoesman, B.Com	Wakil Bendahara

2.3.3. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) di Kota Jambi

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Jambi adalah salah satu cabang dari PDI-P di tingkat kabupaten/kota. PDI-P merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia yang dikenal dengan ideologi nasionalis dan kebangsaan. DPC PDI-P Kota Jambi memiliki tanggung jawab untuk mengelola kegiatan politik, sosial, dan pendidikan politik di tingkat kota Jambi.

Sejarah PDI P di Kota Jambi bermula dari masa reformasi ketika partai ini mulai aktif di di berbagai daerah di Indonesia. Struktur organisasi DPC PDI-P Kota Jambi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa bidang yang mengurus berbagai aspek seperti politik, organisasi, dan hubungan masyarakat.

Tabel 2.3.3 Struktur Komposisi Personalia DPC PDI Perjuangan Kota Jambi Masa
Bhakti 2019-2024

No	NAMA	JABATAN
1	Ir.M.A. Fauzi	Ketua
2	Suprapti S.E	Sekretaris
3	Azhar Syamsyudin	Bendahara
4	Nitra Irmayanti S.H	Wakil Sekretaris Bidang Internal
5	Eddy Susanto	Wakil Bendahara
6	Dra. Lili Priorita	Waka. Bid. Kehormatan Partai
7	Arie Permata S.H	Waka. Bid. Hukum, Ham dan Perundang-Undangan
8	Sutiono S.T	Waka. Bid. Pemenangan Pemilu
9	Julia Fitri Handayani	Waka. Bid. Industri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Koperasi dan Umum
10	Ery S.H	Waka. Bid. Perekonomian
11	Maria Magdalena S.S	Waka. Bid. Ideologi dan Kaderisasi
12	Herianto	Waka. Bid. Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13	Supranoto S.P	Waka. Bid. Kebudayaan
14	Basmar	Waka. Bid. Keanggotaan dan Organisasi
15	Nurchalis	Waka. Bid. Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
16	Dra. Hj. Dismahartati M.M	Waka.Bid. Penanggulangan Bencana dan Kesehatan, Perempuan dan Anak
17	H. Jasman, SE	Waka. Bid. Politik
18	M. Nuryani	Waka. Bid. Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sumber : DPC PDI-P Kota Jambi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan di Kota Jambi

Pendidikan politik merupakan suatu konsep yang memiliki peran penting dalam sebuah sistem sosial politik di suatu negara. Dalam pendidikan politik tentunya membahas tentang bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dan memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka disini akan membahas tentang pelaksanaan fungsi pendidikan politik yang dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kota Jambi. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, PDI-P diharapkan memiliki program-program pendidikan politik yang dapat mengedukasi dan membimbing masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban politik mereka. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh PDI-P di Kota Jambi dalam menerapkan fungsi pendidikan politik, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut.

1.1.1. Pelatihan Kepemimpinan

Salah satu kegiatan utama dalam pendidikan politik untuk kader partai adalah pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang kompeten dan siap menghadapi dinamika politik di lapangan. Yang dimana program ini merupakan kegiatan pendidikan politik internal partai.

Wawancara bersama Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi Ketua DPC PDI P

Mengatakan :

“Kami mengadakan pelatihan kepemimpinan yang diikuti oleh kader-kader muda setiap tahunnya. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membekali mereka dengan keterampilan dalam berorganisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, serta memperkenalkan mereka dengan konsep-konsep dasar ideologi partai.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa DPC PDI P Kota Jambi mengadakan pelatihan kepemimpinan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk membekali para kader partai agar terampil dalam organisasi maupun di masyarakat. Dalam wawancara lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa dalam pelatihan ini para kader diberikan materi tentang strategi komunikasi politik, manajemen organisasi, teknik debat, serta pengenalan terhadap kebijakan-kebijakan publik yang relevan dengan perjuangan partai. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi dan studi kasus untuk melatih kader agar mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi politik yang dinamis. Di samping pendidikan politik untuk kader, DPC PDI-P Kota Jambi juga melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang ditujukan untuk masyarakat umum. Tujuan utama dari pendidikan politik eksternal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong partisipasi politik, serta menyebarkan informasi mengenai hak-hak politik warga negara.

Wawancara bersama Ibu Maria Magdalena sebagai salah satu pengurus dari DPC PDI P Mengatakan :

“Kami berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara yang benar dalam memilih dan pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu. Banyak warga yang masih tidak paham dengan cara memilih yang benar, dan kami berusaha untuk mengubah itu.’

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa DPC PDI P Kota Jambi telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat biasa diluar partai, namun dalam wawancara lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa kegiatan ini belum terlaksana secara rutin. Selanjutnya Dalam kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diberikan informasi mengenai tata cara pemilu, peran penting hak suara, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Wawancara bersama Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi Ketua DPC PDI Perjuangan mengatakan :

” Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, saya dapat mengatakan bahwa kami telah melakukan beberapa langkah dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik, meskipun kami menyadari masih banyak yang perlu diperbaiki. Selama ini, fokus kami lebih banyak pada pendidikan internal untuk anggota partai. Kami mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman ideologi dan kebijakan partai dan kami juga memiliki sekolah partai dan setiap pengurus partai itu kami sekolahkan terutama ketika seseorang ingin menjadi anggota DPRD ataupun kepala daerah dia harus menjalani sekolah politik terlebih dahulu, namun tidak terlalu lama dan sifatnya khusus.”³⁷

³⁷ Wawancara bersama Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi Ketua DPC PDI P. Pada 24 Juli 2024

Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Jambi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah dilakukan yaitu dengan membuat sekolah partai untuk semua anggota partai politik beserta pengurus partai, selanjutnya dengan membuat pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman ideologi dan kebijakan partai. Namun semua kegiatan hanya berfokus kepada internal partai saja, kepada eksternal partai pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini belum terlaksana. Mengingat pengetahuan masyarakat Kota Jambi mengenai pendidikan politik dan sistem politik saat ini sangat minim, jadi masih perlu di tingkatkan dengan kegiatan pendidikan politik yang lebih inklusif dan strategi komunikasi yang efektif juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Maka dari itu, pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi seharusnya dapat di implementasikan secara maksimal. Karena selain untuk mengatasi sifat apatis dari masyarakat, Tanpa pendidikan politik dari partai, masyarakat tidak dapat menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendidikan politik harus menjadi prioritas bagi partai politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi, terlibat, dan kritis terhadap proses politik.

Berikut adalah pelatihan kepemimpinan yang telah dilakukan oleh dpc pdi p kota jambi kepada internal partai atau kepada kader kader partainya serta pemimpin pemimpin dalam partainya. Pendidikan dilakukan dalam bentuk pelatihan, peserta, tujuan, bagaimana metode pelatihannya, berapa lama, serta dengan tanggal pelaksanaannya.

Tabel 3.1. Data Pelatihan Kepemimpinan

No	Bentuk Pelatihan	Peserta	Tujuan	Durasi	Tanggal Pelaksanaan	Metode Pelatihan
1	Pelatihan Kepemimpinan Dasar	Kader pemula dan anggota baru	Meningkatkan pemahaman ideologi partai dan peran pemimpin di organisasi	2 hari	Januari 2024	Diskusi kelompok
2	Pelatihan Komunikasi Politik	Kader partai	Mengembangkan keterampilan komunikasi politik dan kemampuan berbicara di depan umum	3 hari	Maret 2024	Simulasi debat, public speaking role play
3	Pelatihan manajemen organisasi	Kader yang bertugas dalam struktur organisasi	Meningkatkan keterampilan dalam manajemen acara, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan	2 hari	Mei 2024	Diskusi Kelompok
4	Simulasi kepemimpinan dan debat politik	Semua kader	Melatih strategi debat, pemecahan masalah	1 hari	Juli 2024	Debat politik
5	Pelatihan kepemimpinan lanjutan	Pengurus partai	Keterampilan pemimpin untuk lokal dan nasional	2 hari	Juli 2024	workshop

Sumber: Dpc Pdi-p Kota Jambi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh DPC PDI-P Kota Jambi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam berbagai aspek kepemimpinan politik. Pelatihan ini dirancang dengan mempertimbangkan jenjang pengalaman kader, dimulai dari pelatihan kepemimpinan dasar untuk kader pemula hingga pelatihan

kepemimpinan lanjutan bagi kader senior dan pengurus partai. Setiap jenis pelatihan memiliki tujuan yang jelas, antara lain untuk mengembangkan kemampuan komunikasi politik, manajemen organisasi, dan keterampilan dalam pengambilan keputusan serta menghadapi situasi politik yang kompleks. Berbagai metode pelatihan yang digunakan, seperti kuliah umum, diskusi kelompok, simulasi, dan role play, dirancang agar peserta dapat menguasai materi secara interaktif dan praktis. Durasi pelatihan bervariasi antara satu hingga tiga hari, disesuaikan dengan kompleksitas materi yang diberikan, dan diadakan secara rutin setiap tahunnya. Evaluasi pelatihan dilakukan melalui pengisian formulir umpan balik oleh peserta, yang menjadi bahan untuk pengembangan materi dan metode pelatihan selanjutnya. Secara keseluruhan, pelatihan ini menunjukkan komitmen DPC PDI-P Kota Jambi dalam membekali kadernya dengan keterampilan kepemimpinan yang efektif, yang tidak hanya bermanfaat untuk organisasi, tetapi juga untuk menghadapi dinamika politik yang ada di masyarakat.

Dalam wawancara lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pendidikan politik ini sangat penting, karena dengan pemahaman yang baik tentang proses politik, masyarakat akan lebih mampu meminta pertanggung jawaban dari para pemimpin dan wakil mereka, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jadi, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan fondasi yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, terlibat dan kritis. Sebagai salah satu partai yang besar, PDI Perjuangan tentunya memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk meningkatkan

kesadaran politik, pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi. PDI-P harus memastikan bahwa kader dan masyarakat umum mendapatkan akses kepada informasi yang akurat dan relevan mengenai sistem politik, kebijakan publik, dan isu-isu sosial yang sedang berkembang.

Pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh DPC PDI-P Kota Jambi berhasil meningkatkan kemampuan kepemimpinan kader partai dalam berbagai aspek, seperti komunikasi politik, manajemen organisasi, dan strategi kepemimpinan. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan kapasitas kader untuk menghadapi tantangan politik yang ada. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan kurangnya interaktivitas dalam pelaksanaan pelatihan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki metode pelatihan agar lebih melibatkan peserta secara aktif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pelatihan ini bisa lebih efektif dalam mengembangkan kompetensi kader partai.

1.1.2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah salah satu fungsi utama partai dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya, termasuk pemahaman terhadap sistem politik, pemilu, dan cara memilih yang tepat. PDI-P di Kota Jambi menjalankan berbagai kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan mengenal sistem politik Indonesia.

Wawancara dengan Bapak Dandi Sanjaya Humas dari PDI Perjuangan Kota Jambi mengatakan :

“Kami mengadakan seminar dan pelatihan secara terbuka kepada masyarakat umum, terutama menjelang pemilu. Kami memberikan pemahaman tentang cara memilih yang benar, mengapa pemilu itu penting, dan apa peran masyarakat dalam memastikan pemilu yang demokratis.”

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa PDI-P di Kota Jambi sangat serius dalam menjalankan pendidikan politik praktis melalui seminar dan workshop. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan sistem politik Indonesia, pentingnya partisipasi politik, dan cara memilih yang bijak. Dengan demikian, PDIP berusaha menciptakan masyarakat yang tidak hanya memilih berdasarkan popularitas atau desakan, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang matang mengenai hak-hak politik mereka. Dalam wawancara lebih lanjut beliau juga mengatakan bahwa Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menyasar kader partai, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menambah wawasan politik.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Kardi ketua RT Sekaligus masyarakat Mengatakan :

“Sistem politik di Indonesia sudah berkembang dengan adanya demokrasi, termasuk di Kota Jambi. Namun, tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana sistem politik bekerja dan apa yang seharusnya mereka harapkan dari pemimpin mereka. Kami mengadakan pertemuan rutin di RT untuk menyosialisasikan apa itu pemilu, bagaimana memilih dengan bijak, dan apa yang bisa kita dapatkan dari

memilih. Sebagian warga menjadi lebih aktif berpartisipasi setelah mengikuti kegiatan tersebut.”

Dari wawancara dengan Ketua RT, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas seperti yang dilakukan di tingkat RT sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa PDI-P tidak hanya melakukan sosialisasi politik dalam skala besar, tetapi juga menasar komunitas-komunitas kecil untuk memastikan setiap lapisan masyarakat teredukasi dengan baik. Dalam wawancara lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa Menurutnya, meskipun sebagian besar warga sudah memahami hak pilih mereka, adanya pendidikan politik yang lebih terstruktur sangat membantu untuk memperdalam pemahaman mereka. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran politik dan kualitas demokrasi di Kota Jambi, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat. Program pendidikan politik yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama melalui pertemuan di tingkat RT, serta kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat, sangat penting agar masyarakat dapat memilih dengan lebih bijak dan berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Wawancara bersama Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi Ketua DPC PDI

Perjuangan mengatakan :

”Sejauh Kami menyampaikan pendidikan politik itu melalui sekolah partai, pelatihan kader, seminar diskusi publik, kegiatan sosial, media sosial, dan kampanye digital. Kami memiliki beberapa bidang yang mengurus mengenai pendidikan politik ini di DPC, yang pertama namanya BP pemilu yang memiliki tugas melakukan pendidikan politik kepada internal partai,

kemudian mereka akan menyebar lagi kepada masyarakat. Jadi pada intinya pendidikan politik yang kami lakukan secara resmi dan di utamakan adalah kepada internal partai contohnya rapat anak ranting, rapat ranting, rapat kecamatan atau PAC dan DPC setiap minggunya kami melakukan rapat tentang politik, kami lakukan sebagai rutinitas. Dan jika ada yang ingin masuk sebagai anggota baru partai politik, itu akan kami uji terlebih dahulu.”

Pendidikan politik di Kota Jambi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Berbagai program diselenggarakan oleh partai politik, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Beberapa pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan berupa sekolah politik, sosialisasi program partai, pelatihan kader, diskusi publik, media sosial dan kampanye digital. Melalui berbagai bentuk pendidikan politik ini, DPC PDI-P berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi di Kota Jambi.

Tabel 3.2 pelaksanaan pendidikan kader PDI-P

Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Pemateri
25-27 November 2022	1. Pengurus partai tingkat DPC 2. PAC 3. Sayap sayap partai 4. Badan badan partai 5. Kader kader partai yang telah mengikuti Pendidikan kader tingkat pratama	1. I Wayan Sudirta 2. Sigit widiartha 3. Edi Purwanto 4. Zaidan Ismail 5. Nur Tri Kadarini 6. M. Asriadi 7. Nazirin Lazie 8. Edison 9. Ratu Munawaroh 10. Akmaluddin 11. Umi Syamsiatun 12. KPU Prov Jambi 13. Bawaslu Prov. Jambi

Sumber : wakabid DPC PDI-P

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa PDI-P melakukan pendidikan politik kepada kader partai pada November 2022, sesuai pernyataan dari Ketua DPC Pada saat wawancara harusnya pendidikan politik ini dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya, namun pada hasilnya pendidikan politik ini belum rutin di lakukan terutama pada eksternal partai atau masyarakat biasa belum terlaksana sebagaimana seharusnya karena sudah menjadi fungsi dari parpol untuk melakukannya seperti yang tertuang dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Jambi, melakukan pendidikan politik dengan berbagai program. Baik formal, maupun non formal namun tidak terjadwal dan tidak rutin serta tidak menyeluruh. Selanjutnya pernyataan dari ibu Maria Magdalena sebagai salah satu anggota partai politik dari PDI Perjuangan sekaligus Wakil Bidang Kaderisasi dan Ideologi dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Jambi.

Wawancara bersama ibu Maria Magdalena selaku salah satu anggota dari partai politik PDI Perjuangan mengatakan :

”kami sudah melaksanakan pendidikan politik kepada kader seperti kegiatan pelatihan kaderisasi pratama, bintang, seminar dan diskusi terbuka. implementasinya juga sudah kami ciptakan melalui beberapa program seperti pelatihan kader, seminar publik, diskusi kelompok, kegiatan sosial dan penyuluhan. karena itu merupakan salah satu ideologi partai juga. Kepada para kader atau peserta pendidikan politik internal partai kami, kami menyampaikan keadaan pemerintah saat ini seperti apa, dengan arti jangan salah persepsi dengan apa yang ditayangkan di media. karena cara pandang kita berbeda, dan kami juga harus mencerdaskan kader supaya tidak

terpengaruh dengan apa yang ditayangkan atau di isukan di media itulah salah satu pendidikan kader yang sifatnya konsolidasi.”³⁸

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PDI-P memiliki pendekatan yang komprehensif dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota partai . Melalui berbagai program, seperti pelatihan kader, seminar publik, dan diskusi kelompok. Dalam wawancara lebih lanjut beliau mengatakan bahwa mereka tetap melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat hanya saja belum terjadwal dengan baik, salah satu kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat di luar partai adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini juga berfungsi untuk mempererat hubungan antara partai dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai, serta mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Selain itu, kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi kader partai dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam memimpin dan berinteraksi dengan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan politik.

³⁸ Wawancara bersama Ibu Maria Magdalena S.S Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Pada 9 Juli 2024

Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Jambi yaitu berupa kegiatan sosial berupa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti sembako, alat sekolah, atau bantuan bencana. Selanjutnya ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh peserta pendidikan politik.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Jambi memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara partai dan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, partai berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai politik, ideologi, dan program-program partai kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami tujuan dan kebijakan yang diusung oleh partai. Kegiatan sosialisasi ini meliputi pengedukasian masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilu dan pemilihan umum, serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Jambi juga melibatkan berbagai metode komunikasi, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat, diskusi, penyuluhan, dan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan pendekatan yang beragam, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi politik masyarakat dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang peran serta kewajiban mereka dalam kehidupan berpolitik.

Secara keseluruhan, sosialisasi politik yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Jambi merupakan bagian penting dalam proses pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat dukungan terhadap partai di tingkat masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, teredukasi, dan aktif dalam dunia politik.

1.1.3. Diskusi Seminar Politik

Forum diskusi politik menjadi sarana penting bagi kader untuk mengembangkan wawasan politik mereka. DPC PDI-P Kota Jambi mengadakan forum-forum diskusi yang rutin diikuti oleh kader-kader partai, baik yang baru maupun yang sudah lama. Dalam forum ini, para kader dapat berdiskusi tentang isu-isu politik terkini, baik yang menyangkut tingkat lokal maupun nasional.

Wawancara bersama Ibu Maria Magdalena sebagai salah satu kader partai DPC PDI P Kota Jambi Mengatakan :

“Diskusi politik di DPC PDI-P selalu memberikan kami wawasan baru, baik tentang isu-isu politik nasional maupun lokal. Forum ini juga menjadi tempat bagi kami untuk saling berbagi pengalaman dan solusi terkait tantangan yang kami hadapi di lapangan.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa DPC PDI P Kota Jambi melakukan pendidikan politik salah satunya adalah melalui Diskusi Seminar politik atau diskusi politik, Forum diskusi ini berfungsi sebagai media untuk memperluas pemahaman politik dan memperkaya perspektif para kader. Kegiatan ini juga mengajarkan kader untuk berdebat secara sehat, serta berpikir kritis terhadap isu-isu yang berkembang dalam politik. Dalam wawancara lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa mereka melakukan pendidikan politik kepada kader partainya, maka dari itu berikut tanggapan dari bapak Sofian salah satu kader partai yang sudah pernah ikut dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Wawancara bersama bapak Sofian selaku salah satu anggota PDI Perjuangan yang mengikuti pendidikan politik mengatakan :

“ Ketika saya mengikuti pendidikan politik, kami diberikan pemahaman mendalam tentang ideologi PDI-P, sejarah partai, serta visi dan misi dari partai kami. Selain itu, kami juga mempelajari strategi politik, teknik komunikasi, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. setelah kegiatan itu peningkatan partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan politik dan sosial di daerah menjadi lebih baik.”

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun DPC PDI-P Kota Jambi telah berupaya menjalankan fungsi pendidikan politik melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye, masih ada kekurangan dalam hal pendalaman materi pendidikan politik bagi masyarakat. Warga menginginkan program pendidikan politik yang tidak hanya fokus pada kampanye atau isu-isu praktis yang terkait dengan pemilu, tetapi juga yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak politik, kewajiban sebagai warga negara, dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk itu, DPC PDI-P perlu merancang program yang lebih edukatif dan partisipatif, misalnya melalui seminar, diskusi, atau pelatihan yang bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Dengan cara ini, pendidikan politik di Kota Jambi akan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas demokrasi serta partisipasi politik masyarakat.

Dalam wawancara lebih lanjut, Bapak Parulian mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat berpengaruh dari latar belakang pendidikan. Contohnya adalah perbedaan tingkat partisipasi politik dari masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah atau bahkan tidak lulus SMA sederajat. Pastinya akan

sangat berbeda. Terutama saat pemilu, beliau menyampaikan bahwa di sekitarnya banyak masyarakat yang sangat apatis bahkan tidak pergi ke tempat pemilihan pada pemilu legislatif Februari lalu. Adanya indikasi antara tingkat pendidikan politik dan partisipasi. Maka kurangnya perhatian terhadap pendidikan politik ini berakibat kepada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, lebih rendah dari 2019 tingkat partisipasi pemilih di Kota Jambi pada 2024. perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun	Jumlah DPT	Jumlah Partisipasi Pemilih	Jumlah Golput
2019	446.082	80,39%	19,61%(87.476)
2024	451.723	78.29%	21,71%(98.000)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Jambi, tingkat partisipasi pemilih di Kota Jambi pada pemilu 2024 hanya 78,29%, atau 353.675 orang warga yang menyalurkan suaranya dengan jumlah DPT 451.723 yang artinya lebih dari 98.000 warga Kota Jambi yang golput. Dan angka golput ini meningkat dari pemilu 2019 lalu, pada pemilu 2019 lalu angka partisipasi masyarakat mencapai 80,39% dan yang golput hanya 19,61%.

Anggota PDI Perjuangan yang telah mengikuti pendidikan politik mengungkapkan beberapa poin penting mengenai pengalaman dan dampak dari program tersebut. Anggota menyampaikan bahwa pendidikan politik mencakup pemahaman mendalam tentang ideologi PDI-P, sejarah partai, visi dan misi, serta strategi politik dan teknik komunikasi. Namun, pendapat ini agak sedikit berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh ibu Rusli salah satu peserta yang menjalani pendidikan politik juga.

Wawancara bersama ibu Rusli Anum selaku peserta dalam pendidikan politik oleh PDI-P mengatakan :

“saya merasa pendidikan politik yang diberikan PDI-P masih bisa ditingkatkan. Meskipun materi yang disampaikan cukup informatif, saya merasa ada beberapa aspek yang kurang mendalam. Saya rasa ada kekurangan dalam hal penerapan praktis. Banyak teori yang disampaikan, tetapi saya berharap ada lebih banyak simulasi atau praktik langsung tentang bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tersebut di lapangan. Misalnya, dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau dalam menghadapi isu-isu politik yang kompleks. Saya mengakui bahwa ada beberapa keberhasilan, terutama dalam meningkatkan kesadaran politik dasar. Namun, jika dilihat dari segi keterlibatan anggota di tingkat masyarakat, masih ada ruang untuk perbaikan.”

Dari kedua pernyataan yang di kemukakan oleh peserta pendidikan politik internal partai menyampaikan bahwa anggota pertama merasa pendidikan politik yang diberikan PDI-P berhasil dan bermanfaat. Mereka menghargai pemahaman yang lebih dalam tentang ideologi partai, sejarah, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Anggota merasa lebih percaya diri dan siap untuk berkontribusi dalam kegiatan politik serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Sedangkan anggota kedua menawarkan pandangan yang lebih kritis. Anggota ini merasakan bahwa meskipun pendidikan politik memiliki aspek positif, masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal penerapan praktis dan interaksi dengan masyarakat. Mereka menekankan perlunya lebih banyak kegiatan yang bersifat interaktif dan aplikatif, seperti simulasi atau studi kasus, untuk mempersiapkan anggota menghadapi tantangan di lapangan.

Kesimpulannya, sementara satu anggota melihat pendidikan politik sebagai langkah sukses dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan politik, yang lain

berpendapat bahwa program tersebut masih memerlukan perbaikan dalam hal praktik dan interaksi langsung dengan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Dua sudut pandang ini mencerminkan kompleksitas dalam pelaksanaan pendidikan politik dan kebutuhan untuk terus mengembangkan program agar lebih efektif. Sementara itu ada juga tanggapan dari beberapa masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Kardi ketua RT Sekaligus masyarakat Mengatakan :

“Sistem politik di Indonesia sudah berkembang dengan adanya demokrasi, termasuk di Kota Jambi. Namun, tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana sistem politik bekerja dan apa yang seharusnya mereka harapkan dari pemimpin mereka. Masyarakat cenderung terlibat dalam politik hanya pada saat pemilu tanpa pemahaman yang mendalam. Pengetahuan masyarakat di sini tentang pendidikan politik masih terbatas. Menurut saya, Pendidikan politik perlu dimulai dari tingkat RT. Program yang mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban politik mereka harus disampaikan dengan cara yang sederhana dan praktis. Melibatkan partai politik dan pemerintah kota untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif yang fokus pada pemahaman politik akan sangat membantu..”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Kota Jambi terlibat dalam pemilu, pemahaman mereka mengenai politik dan pentingnya pendidikan politik masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak politik dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk meningkatkan kesadaran politik dan kualitas demokrasi di Kota Jambi, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat. Program pendidikan politik yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama melalui pertemuan di tingkat RT, serta kerjasama antara pemerintah,

partai politik, dan organisasi masyarakat, sangat penting agar masyarakat dapat memilih dengan lebih bijak dan berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Dalam wawancara lebih lanjut, terungkap bahwa pemahaman tentang sistem politik di Kota Jambi masih kurang. Masyarakat merasa bingung dengan kompleksitas sistem politik dan mengakui bahwa informasi yang tersedia sering kali tidak jelas atau sulit dipahami. Meskipun ada kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan, partisipasi masyarakat masih rendah, sebagian besar karena kurangnya akses dan sosialisasi yang efektif. Masyarakat mengharapkan adanya program pendidikan politik yang lebih interaktif dan mendekati diri kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami dan terlibat lebih aktif dalam proses politik. Harapan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat sangat bergantung pada upaya yang lebih intensif dan kreatif dalam menyampaikan informasi dan pendidikan politik. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ados Alexander

Wawancara dengan Bapak Arif yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial politik :

“Saya pikir salah satu masalah utama adalah apatisisme. Banyak orang yang tidak peduli dengan politik karena mereka merasa tidak paham tentang apa yang terjadi. Contohnya yang saya lihat disekitar saya banyak orang yang tidak datang ke tempat pemungutan suara waktu pemilu februari lalu, atau tidak ikut dalam diskusi politik karena mereka merasa suaranya tidak akan berpengaruh. Ini sangat disayangkan, karena suara masyarakat sangat penting.”

Dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendidikan politik telah menyebabkan beberapa masalah serius. Pertama, apatisisme menjadi masalah utama, di mana banyak orang merasa tidak peduli terhadap politik karena

kurangnya pemahaman. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Selain itu, masyarakat juga mengalami penyebaran informasi yang keliru, di mana ketidakpahaman membuat mereka rentan terhadap hoaks dan berita palsu, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Masyarakat berharap agar lebih banyak program pendidikan politik diadakan, terutama yang menjangkau daerah-daerah sulit dijangkau.

Wawancara dengan Parulian Saragih Salah satu masyarakat dari salah satu organisasi mengatakan :

“Bagi saya, masalahnya lebih kepada penyebaran hoaks. Tanpa pendidikan politik, orang mudah terpengaruh berita palsu yang sering beredar di media sosial. Karena menurut saya Ketika orang terpengaruh hoaks, mereka menjadi skeptis dan tidak percaya pada partai politik atau proses demokrasi. Ini bisa mengarah pada apatisme dan ketidakpedulian.”

Tanpa pemahaman yang memadai tentang isu-isu politik, masyarakat rentan terhadap informasi yang keliru, terutama yang beredar di media sosial. Hal ini berpotensi mengubah sikap masyarakat menjadi skeptis terhadap politik dan proses demokrasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan apatisme dan ketidakpedulian. Masyarakat menekankan bahwa pendidikan politik yang lebih baik dapat membantu mengurangi dampak negatif ini, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat. Kesimpulannya, peningkatan pendidikan politik di masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam sistem politik.

Wawancara bersama ibu Tuti selaku masyarakat Kota Jambi yang memilih PDI P Pada pemilu lalu mengatakan :

“Saya memilih PDIP karena banyak teman dan keluarga yang juga memilih mereka. Saya percaya mereka bisa membawa perubahan yang baik. Sebenarnya, saya belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan politik. Saya tidak begitu paham tentang program-program mereka. Karena saya tidak mendapatkan pendidikan politik, saya memilih berdasarkan rekomendasi dari orang-orang di sekitar saya. Saya ingin lebih paham, tapi belum tahu harus mulai dari mana.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan pendidikan politik dari DPC PDI Perjuangan di Kota Jambi. Sementara itu masyarakat menganggap bahwasanya pendidikan politik sangat penting untuk membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karena tanpa pendidikan politik yang memadai, mereka merasa bingung dan kurang berdaya dalam menghadapi isu-isu politik. Dalam wawancara lebih lanjut, masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka berharap partai dapat mengadakan program pendidikan politik yang lebih terencana dan teratur, seperti kelas atau workshop yang dapat diakses oleh masyarakat. Mereka juga menyarankan penggunaan metode interaktif, seperti diskusi kelompok dan simulasi pemilu, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang.

Kesimpulan dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, sosialisasi politik, serta seminar dan diskusi politik yang dilakukan oleh DPC PDI-P Kota Jambi menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman politik, kualitas kader, dan partisipasi bagi sebagian masyarakat. Pelatihan kepemimpinan berhasil meningkatkan keterampilan politik dan kepemimpinan kader, meskipun metode yang digunakan perlu lebih interaktif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Sosialisasi politik efektif dalam meningkatkan kesadaran politik bagi sebagian masyarakat, karena adanya indikasi

tingkat pendidikan di masyarakat yang berpengaruh kepada rendahnya partisipasi politik masyarakat. Seminar dan diskusi politik memberi wawasan mengenai isu-isu politik terkini, namun keterbatasan waktu dan materi yang kurang aplikatif harus diperbaiki agar lebih relevan dengan kondisi lokal. Secara keseluruhan, ketiga kegiatan ini berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih sadar politik dan kader yang lebih terampil, serta memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat di Kota Jambi.

Dari wawancara dengan masyarakat mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum mendapatkan pendidikan politik yang terstruktur dan rutin. Masyarakat berharap agar PDIP dan partai politik lainnya lebih proaktif dalam mengadakan program pendidikan politik yang terjadwal, yang dianggap penting untuk meningkatkan keterlibatan dalam proses demokrasi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan politik sangat tinggi, dan dengan adanya pendidikan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI-P Kota Jambi masih menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai tujuan yang maksimal. Meskipun PDI-P telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan kampanye politik yang melibatkan masyarakat, sebagian besar kegiatan tersebut masih lebih terfokus pada aspek politik praktis, seperti penyampaian visi-misi partai dan mobilisasi suara pada saat pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan politik yang

dilakukan cenderung kurang mendalam dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak politik, kewajiban sebagai warga negara, dan pentingnya partisipasi politik yang bijak.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh PDI-P lebih banyak berfokus pada tujuan jangka pendek, yaitu pemilihan calon legislatif atau kepala daerah, ketimbang pada upaya yang berkelanjutan untuk mendidik masyarakat tentang sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat juga merasa bahwa informasi yang diberikan masih kurang menggali aspek-aspek yang lebih mendalam mengenai cara memilih secara rasional dan mengkritisi kebijakan politik yang ada. Masyarakat Kota Jambi mengharapkan agar PDI-P tidak hanya mengedepankan kepentingan elektoral, tetapi juga mengedukasi mereka tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, peran partai politik dalam sistem pemerintahan, serta cara menilai calon pemimpin secara objektif. Dengan demikian, pendidikan politik yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan bermakna, tidak hanya terbatas pada peningkatan partisipasi pemilu, tetapi juga dalam membangun kesadaran politik yang lebih kritis dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat.

PDI-P Kota Jambi melaksanakan komunikasi politik yang intens di kalangan kader dan pengurus partai. Melalui berbagai pelatihan, seminar, dan diskusi internal, partai berusaha menyampaikan ideologi dan visi partai kepada kader agar mereka dapat menyebarkan pesan-pesan politik tersebut dengan efektif ke masyarakat. Di internal partai, sosialisasi politik dilakukan untuk membangun komitmen kader terhadap ideologi partai dan memperkenalkan nilai-nilai politik

yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota. PDI-P secara konsisten menyelenggarakan seminar yang membahas pentingnya Pancasila, UUD 1945, dan sejarah perjuangan partai. Dalam hal ini, fungsi sosialisasi politik berjalan dengan baik, karena kader diperkenalkan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar dari segala kegiatan partai, yang mana mereka diharapkan dapat menyosialisasikan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat.

Selanjutnya Dalam hal sosialisasi politik, meskipun PDI-P mengadakan seminar dan diskusi publik, program-program tersebut lebih fokus pada promosi partai dan calon legislatif ketimbang memberikan pemahaman dasar tentang sistem politik, hak pilih, dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi sosialisasi politik kepada masyarakat masih terbatas pada pengenalan partai dan calon-calon yang diusung, tanpa menyentuh aspek pendidikan politik yang lebih fundamental, seperti pemahaman tentang demokrasi, hak asasi, dan kewajiban politik.

3.2 Kendala Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Masyarakat

Dalam menjalankan suatu program, tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kendala termasuk pada proses terlaksananya pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi yang merupakan salah satu kewajiban atau fungsi dari partai politik. Mengingat kota jambi sebagai bagian dari negara demokratis yang berarti memerlukan pendidikan politik dengan alasan penting yaitu untuk meningkatkan kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif, mengurangi misinformasi, memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kualitas

pemimpin, membangun kepercayaan terhadap institusi politik, mendorong keterlibatan dalam isu sosial. Dengan berbagai tujuan tersebut, pendidikan politik menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat di Kota Jambi, maka kendala dalam proses pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini di cetuskan langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan yaitu Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi.

Wawancara bersama Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi Ketua DPC PDI Perjuangan Masa Bhakti 2019-2024 mengatakan :

”Ya, kami menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kota Jambi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. selain itu, akses informasi juga menjadi tantangan. Kami juga menghadapi kendala dalam keterlibatan kader. Meskipun banyak kader yang bersemangat, mereka sering kali terhambat oleh kesibukan kerja dan aktivitas lain. Ini membuat jadwal pelatihan dan kegiatan pendidikan politik menjadi tidak konsisten. Kemudian, Kami terkadang mengalami keterbatasan dana untuk menyelenggarakan kegiatan yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak orang.”

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang menjadi penghambat terlaksananya pendidikan politik di Kota Jambi ini Pertama, terdapat kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, yang menyebabkan apatisme terhadap kegiatan politik. Akses informasi yang terbatas, terutama di daerah terpencil, menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang pendidikan politik. Kendala lainnya adalah keterlibatan kader dan anggota partai, di mana kesibukan individu seringkali mengganggu partisipasi dalam program-program yang diselenggarakan. Masalah sumber daya juga menjadi tantangan, dengan keterbatasan dana dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan yang lebih besar. Hal ini kemudian didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Magdalena.

Wawancara bersama ibu Maria Magdalena salah satu anggota partai PDI P sekaligus Wakil Bidang Kaderisasi dan Ideologi dalam kepengurusan DPC PDI P Kota Jambi mengatakan :

”Ya, kami memiliki beberapa tantangan atau kendala yang kami hadapi dalam proses pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini tantangan utama yang kami hadapi adalah rendahnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, yang seringkali mengakibatkan apatisme terhadap keterlibatan dalam proses demokrasi, akses informasi yang terbatas, dana yang terbatas, serta keterlibatan anggota kader dan anggota partai juga menjadi masalah.”
Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Partai politik itu

sendiri menyadari bahwa pendidikan politik ini sangat penting dilakukan kepada masyarakat biasa diluar anggota partai karena sifat apatis dan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik juga akan sangat berpengaruh. Untuk mencari solusi dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat serta memanfaatkan teknologi dan media sosial guna menjangkau masyarakat lebih luas, terutama generasi muda. Dengan upaya ini, PDI-P berharap dapat mengatasi kendala-kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas pendidikan politik di Kota Jambi, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Wawancara bersama Bapak Reza yang merupakan sebagai Humas dan Media mengatakan :

“Ya, adanya perbedaan tingkat pemahaman yang menjadi kendala bagi kami. Beberapa orang mungkin sudah memiliki pemahaman yang baik tentang politik, sementara yang lain masih sangat awam. Hal ini menyulitkan kami untuk menemukan titik tengah dalam penyampaian materi. Selain itu, stigma negatif terhadap politik juga menjadi masalah. Banyak orang yang skeptis terhadap partai politik dan kegiatan politik secara umum, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi.”

Dalam wawancara lebih lanjut Humas DPC PDI Perjuangan, terungkap beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kota Jambi. Pertama, ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan politik, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi. Selain itu, akses informasi yang terbatas, terutama di daerah terpencil, juga menjadi masalah, membuat masyarakat tidak tahu tentang kegiatan yang diselenggarakan. Beliau juga menyampaikan tantangan terkait keterlibatan kader, di mana kesibukan mereka sering kali menghambat partisipasi dalam sosialisasi. Kendala lain yang dibahas adalah stigma negatif terhadap politik, yang membuat masyarakat skeptis dan enggan berpartisipasi. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari bapak Dandi Sanjaya yang juga merupakan anggota partai yang sering turun ke masyarakat.

Wawancara dengan bapak Dandi Sanjaya yang juga merupakan anggota partai yang sering turun ke masyarakat mengatakan :

“Ya, Dana memang menjadi salah satu kendala yang sangat penting bagi kami. Tanpa anggaran yang memadai, kami kesulitan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dengan kualitas yang baik. Dana sangat penting dalam berbagai aspek pendidikan politik. Salah satunya adalah untuk mengundang narasumber yang kompeten. Kami ingin peserta mendapatkan pengetahuan yang berkualitas dari orang-orang yang berpengalaman.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan politik, terutama masalah dana. Dana dianggap sebagai faktor krusial yang berperan dalam berbagai aspek kegiatan, termasuk mengundang narasumber, mencetak materi pelatihan, serta menyediakan fasilitas dan logistik. Kendala lainnya mencakup kurangnya kesadaran masyarakat, akses informasi yang terbatas, serta keterbatasan waktu anggota dalam

berpartisipasi. anggota Humas juga menyoroti pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif dan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, dana tidak hanya digunakan untuk kegiatan itu sendiri, tetapi juga untuk promosi, kegiatan interaktif, transportasi, dan evaluasi program. Dengan pengelolaan dana yang baik, PDI-P berharap dapat meningkatkan efektivitas pendidikan politik dan menjangkau lebih banyak masyarakat di Kota Jambi. Secara keseluruhan, kesadaran akan pentingnya dana dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada menjadi kunci untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik yang berdampak positif bagi masyarakat.

Wawancara bersama Bapak Beni yang merupakan anggota partai yang sering turun ke masyarakat mengatakan :

“kami perlu bekerja lebih keras untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan keterlibatan mereka dalam setiap tahap kegiatan. Program-program yang kami jalankan harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan relevan dengan kondisi sosial mereka.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan politik harus dirancang secara holistik untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai sistem demokrasi, hak dan kewajiban politik, serta partisipasi aktif dalam proses politik. Kemudian, perluasan jangkauan program melalui strategi yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. DPC PDI-P perlu merancang pendekatan yang lebih relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan keberagaman pemahaman politik yang ada di kalangan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik akan lebih

efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan Ketua DPC PDI-P Kota Jambi beserta jajarannya, terdapat sejumlah kendala signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Meskipun DPC PDI-P telah berupaya menjalankan program pendidikan politik, beberapa faktor penghambat masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi efektivitas kegiatan ini.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk mengelola dan menyampaikan materi pendidikan politik menjadi salah satu kendala utama. Para kader partai, meskipun memiliki semangat yang tinggi, masih memerlukan pelatihan lebih lanjut agar dapat menyampaikan materi politik dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kader yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik sering kali belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori politik maupun strategi komunikasi yang efektif dalam mengedukasi warga. Hal ini menyebabkan kurangnya dampak yang signifikan dari program pendidikan politik yang dilakukan. Kedua, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik menjadi faktor penghambat lainnya. Program yang melibatkan masyarakat dalam skala besar, seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan, memerlukan dana yang cukup besar. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kegiatan ini sulit dilaksanakan secara berkelanjutan dan dalam jumlah yang optimal, sehingga jangkauan pendidikan politik yang diberikan terbatas pada segmen-segmen tertentu saja. Selain itu, kurangnya kesadaran politik di kalangan

masyarakat juga menjadi tantangan utama. Meskipun kegiatan pendidikan politik telah dilakukan, sebagian besar masyarakat masih belum memahami sepenuhnya bagaimana pendidikan politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memengaruhi kehidupan politik mereka. Mereka cenderung melihat kegiatan ini hanya sebagai bagian dari strategi elektoral partai, bukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak politik dan peran aktif mereka dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat lebih fokus pada kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sehari-hari, yang mengarah pada kurangnya perhatian terhadap isu-isu politik. Banyak warga yang belum menyadari pentingnya pendidikan politik sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PDI-P kurang mendapat antusiasme dari masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri. Selain itu, kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan utama. Meskipun kegiatan pendidikan politik telah dilakukan, sebagian besar masyarakat masih belum memahami sepenuhnya bagaimana pendidikan politik dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memengaruhi kehidupan politik mereka. Mereka cenderung melihat kegiatan ini hanya sebagai bagian dari strategi elektoral partai, bukan sebagai upaya

untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak politik dan peran aktif mereka dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun DPC PDI-P Kota Jambi telah berusaha untuk melaksanakan fungsi pendidikan politik, terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi agar program tersebut dapat lebih efektif. Kendala-kendala tersebut, baik yang bersifat internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, maupun eksternal seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran politik, memerlukan perhatian serius untuk diperbaiki. Untuk itu, DPC PDI-P perlu meningkatkan kapasitas kader partai, merancang program pendidikan politik yang lebih inovatif dan partisipatif, serta memastikan bahwa kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan tidak hanya berbasis pada tujuan elektoral, tetapi juga berfokus pada peningkatan kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat yang lebih luas.

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya keteraturan dan jadwal yang terorganisir untuk kegiatan pendidikan politik. Tanpa program yang terstruktur dan terjadwal, komunikasi politik dengan masyarakat menjadi tidak efektif, dan masyarakat pun kurang mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai politik dan peran mereka dalam demokrasi. Hal ini menghambat terjadinya fungsi komunikasi politik yang optimal. Kemudian, ketidaktertarikan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PDI-P menjadi kendala lain. Masyarakat lebih cenderung tidak terlibat dalam

diskusi atau seminar politik karena mereka merasa bahwa kegiatan tersebut tidak relevan dengan kehidupan mereka. Padahal, dalam teori sosialisasi politik, partai politik memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat agar mereka aktif dalam proses demokrasi. Selanjutnya, Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki PDI-P di Kota Jambi juga menghambat pelaksanaan pendidikan politik secara maksimal. Tanpa dukungan yang cukup, fungsi rekrutmen politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan efektif. Sumber daya yang terbatas menyebabkan kegiatan pendidikan politik menjadi terbatas jangkauannya.

Pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Jambi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh PDIP masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dalam hal sumber daya, baik itu dalam bentuk dana maupun tenaga pengajar, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik. PDIP perlu mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Selain itu, ada pentingnya edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat mengenai isu-isu politik. Sebagian masyarakat menginginkan adanya program yang tidak hanya diadakan menjelang pemilu, tetapi juga sepanjang tahun. Hal ini bertujuan agar masyarakat selalu terinformasi dan teredukasi tentang perkembangan politik dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat yang minim, meskipun terdapat

beberapa kegiatan, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik masih minim. Banyak individu merasa apatis atau tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi.

Dari penjelasan di atas maka dalam upaya membangun kesadaran politik, PDIP perlu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media. Kerjasama ini dapat membantu menjangkau lebih banyak individu dan mengedukasi mereka tentang pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Diperlukan program yang lebih terstruktur, interaktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Jambi dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan beberapa pernyataan dari berbagai informan, maka penelitian ini menemukan bahwa adanya ketidakpahaman darimasyarakat, adanya kendala dalam mengenai proses politik, hak-hak pemilih, dan peran partai politik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan politik di Kota Jambi berkontribusi pada sejumlah masalah, termasuk rendahnya partisipasi pemilih dan ketidakpahaman masyarakat terhadap isu-isu politik. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak politik mereka, serta peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi. Ketidakpahaman ini berpengaruh langsung terhadap apatisisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa suara dan pilihan mereka tidak memiliki dampak signifikan. Selain itu, kondisi ini menciptakan ruang bagi penyebaran informasi yang salah dan manipulatif, yang semakin memperburuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui analisis dan temuan penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Jambi mengalami berbagai tantangan yang berdampak signifikan pada masyarakat. Rendahnya partisipasi pemilih, yang hanya mencapai sekitar 78,29%, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan hak-hak politik mereka, sehingga banyak yang merasa apatis terhadap isu-isu politik karena kurang terlaksananya pendidikan politik. Namun dibalik itu, DPC PDIP juga menghadapi kendala dalam menyelenggarakan program pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan keterbatasan sumber daya dan strategi komunikasi yang kurang efektif. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melaksanakan program pendidikan politik yang bersifat berkelanjutan agar masyarakat terus teredukasi dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya yang lebih kuat dari PDIP dan partai politik lainnya dalam menyediakan pendidikan politik yang inklusif dan menarik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam sistem politik dan berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

4.2 Saran

PDIP perlu merancang program pendidikan politik yang terstruktur dan terjadwal, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa partai politik berfungsi untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, metode penyampaian materi harus lebih interaktif dan menarik agar masyarakat lebih mudah memahami isu politik. Penting bagi PDIP untuk menjalin kolaborasi dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media untuk memperluas jangkauan program pendidikan politik. Edukasi berkelanjutan juga harus diadakan secara berkala, tidak hanya menjelang pemilu, untuk membangun kesadaran politik yang kuat. Terakhir, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program, serta pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pendidikan politik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Kemudian sebagai masyarakat juga harus peka dengan isu-isu politik yang terjadi saat ini terutama anak muda saat ini yang sudah dapat dengan mudah mengakses informasi di media serta memilahnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto,S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakir,R. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Tangerang Karisma Publishing Grup
- Budiarjo,Miriam.(2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik* : Gramedia Pustaka Utama.
- Citriandi, Y. (2019). *Pengantar Pendidikan* . Jln.Gajah Mada no.100 Jempong Baru Sekarbela Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
- Hasibuan Imran, Malay Afnan, Nursatyo, Irwansyah. 2015. *Gerak Sejarah Partai Banteng PNI, PDI, dan PDI Perjuangan*. Jakarta: DPP PDI Perjuangan bekerjasama dengan Q Communication.
- Ilham, D. M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Khoiron, M.N., & Nur, M. (1999). Pendidikan Politik Bagi Warga Negara: Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja. *Yogyakarta: LKIS*.
- Lestari, E.H.(2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya,
- Soehartono, I.(2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bandung Remaja Rosda.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, Irawati. (2014) *Selayang Pandang Kota Jambi*. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal (31) Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal (11) Tentang Partai Politik disebutkan fungsi dari partai politik yaitu Pendidikan politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 pasal 1 angka (1) tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Belladonna, A. P. (2018). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Hartono, R. (2016). Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat Universitas Negeri Yogyakarta .
- Kareth, M. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi Di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1607040.
- Kuntowijoyo, K. (1994). *Metode Sejarah*.
- Muhammad, F. Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemulaa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Skripsi.
- Munawar, Ridwan D. (2015). Strategi Politik DPC PDI-P Kabupaten Bantul Dalam Pemenangan Pilpres Tahun 2014.
- Nasution, A. A., & Hapsa, H. (2022). *Kemenangan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Pada Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019*.
- Wiratman, Ahmad. 2018. *Aktivitas Public Relations Politik PDI Perjuangan Melalui Konsolidasi Menjelang Pemilihan Gubernur Bali 2018*”, Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

WEBSITE

- Ensiklopedia Dunia Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jambi <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/daftarkecamatanandankelurahan>. di akses 4 juli 2024.
- Era.id, Mata Banteng di Logo PDIP <https://era.id/sejarah/75967/mata-banteng-dilogo-pdip-kok-merah-bukan-putih-apa-maksudnya-ya>, diakses pada tanggal 4 juli 2024.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas di akses pada tanggal 9 Maret 2024 url: https://id.wikipedia.org/wiki/partai_politik.

Pdiperjuangan.id, Visi dan Misi <https://pdiperjuangan.id/detailarticle/107/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

Pdiperjuangan.id, Tata Kelola Partai <https://pdiperjuangan.id/detailarticle/841/tata-kelola-partai> diakses pada tanggal 4 juli 2024

Pemerintahan Kota Jambi, “Sejarah Kota Jambi” <https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/> diakses 3 Juli 2024.

Kompas.com ‘*Sejarah Kota Jambi ; Asal-Usul Nama, Cerita Angso Duo dan Lokasi*’ <https://regional.kompas.com/read/2022/02/11/sejarah-kota-jambi-asal-usul-nama-cerita-angso-duo-dan-lokasi>-diakses 3 juli 2024.

LAMPIRAN

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC - PDI PERJUANGAN)
KOTA JAMBI**

Nomor : 169/EX/DPC-05-09/VII/2024
Lamp- : -
Perihal : Hasil Penelitian

Jambi, 24 Juli 2024
Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**
di-
Jambi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor: 3432/UN21.4/PT.01.04/2024 tertanggal 04 Juli 2024 perihal Pengantar izin penelitian dan permintaan Data Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Mei J Sihombing
Nomor Induk Mahasiswa : H1B120051
Program Studi : Ilmu Politik

Benar telah melaksanakan wawancara dan penelitian yang berjudul " **Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Jambi**".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DPC PDI Perjuangan Kota Jambi

Ketua

Ir. M. A. FAUZI

Sekretariat : Jln. Jenderal Sudirman No. 35 C Kota Jambi Telp. (0741) 31289

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI**

Jl. H. Zainir Haviz Telp. (0741) 445110 – 445311 – 444567 – 444557 Fax. 40015 Kode Pos : 36128
J A M B I

SURAT KETERANGAN
05/DPRD/ F.PDI Perjuangan/VII/2024

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi menerangkan bahwa :

Nama : Mei J Sihombing

Nomor Induk Mahasiswa : H1B120051

Program Studi : Ilmu Politik

Bahwa nama tersebut diatas telah menghadap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi berdasarkan surat nomor 3432/UN21.4/PT.01.04/2024 pada tanggal 04 Juli 2024 dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jmabi”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jambi, 09 Juli 2024

**Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi**

KETUA

Maria Magdalena, S.S

DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ir. Muhammad Amir Fauzi Selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Fraksi PDI P Yang juga merupakan Ketua Dari DPC PDI Perjuangan Kota Jambi. Di kantor beliau pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 10:00 WIB.

Dokumentasi Bersama Ibu Maria Magdalena S.S yang merupakan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 2, Komisi 4 bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Sekaligus juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Jambi. Pada tanggal 09 Juli 2024, Pukul 11:00 WIB.

Dokumentasi Bersama Bapak Sofian Mantan Anggota DPRD Prov Jambi 2 periode yang mengikuti sekolah politik atau pendidikan politik dari PDI Perjuangan. Wawancara berlangsung pada tanggal 7 Juli 2024, Pukul 11:00 WIB.

Wawancara Bersama Bapak Reza selaku bagian humas dan media. Yang bertempat di DPC PDI P Kota Jambi pada tanggal 24 Juli 2024, Pukul 14:00 WIB.

Wawancara Bersama Bapak Muhammad Kardi Ketua Rukun Tetangga 05, Kelurahan Simpang 3 Sipin di kediaman beliau Arizona. Pada tanggal 2 Oktober 2024, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara Bersama salah satu masyarakat Parulian Saragih dari Organisasi Pemuda Batak Bersatu Wawancara dilakukan di kediaman beliau Pada tanggal 2 Oktober 2024, Pukul 13:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Arif salah satu tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan pandangan tentang politik. Wawancara di lakukan di tempat kerja beliau pada tanggal 1 Oktober 2024, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Tuti Masyarakat yang dalam pemilu sebelumnya memilih PDI P, Wawancara berlangsung di tempat beliau bekerja Pada tanggal 2 Oktober, Pukul 16:00 WIB.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mei Jernita Sihombing
Tempat / Tanggal Lahir : Pangambatan, 08 Mei 2002
NIM : H1B120051
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pernikahan : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Alamat KTP : Desa Pargaulan, kec. Lintong Nihuta
Nomor Telepon/HP : 082272580538
Email : sihombingmei29@gmail.com

Periode (Tahun)	Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2008-2014	SDN 173333 Lintong Nihuta	-	6 Tahun
2014-2017	SMPN 2 Lintong Nihuta	-	3 Tahun
2017-2020	SMAN 1 Lintong.Nihuta	IPS	3 Tahun